



Realisasi Pendapatan KKU Rp 522 M

KAYONG UTARA, TRIBUN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kayong Utara kembali menggelar rapat paripurna agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kayong Utara tahun anggaran 2014, di Gedung DPRD, Senin (27/7).

Wakil Bupati Kayong Utara, Idrus bersama sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menghadiri paripurna dan dipimpin langsung Ketua DPRD Kayong Utara, M Sukardi didampingi wakil ketua, Tajudin.

Wakil Bupati Kayong Utara, Idrus memaparkan klarifikasi terkait adanya kekeliruan dalam penyajian data pada dokumen laporan pertanggungjawaban kepala daerah yang disampaikan beberapa waktu yang lalu.

"Kekeliruan tersebut terjadi saat proses editing dokumen laporan keuangan terhadap kegiatan pelayanan donor darah. Yang semula tersaji sebesar Rp 681,78 juta, seharusnya Rp 57,11

juta, dan kegiatan pelayanan sunatan massal yang semula tersaji sebesar Rp 3,21 miliar, seharusnya Rp 84,11 juta," kata Idrus.

Idrus menyampaikan, laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kayong Utara tahun anggaran 2014 telah diaudit pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 30 hari, April lalu. Dari hasil audit tersebut, yang diterima pemerintah pada awal Juli, Kabupaten Kayong Utara mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP).

"Berarti laporan keuangan pemerintah KKU untuk tahun 2014, masih urutan kedua dari yang pertama. Mudah-mudahan dengan tekad dan semangat yang tinggi, pada 2015, laporan keuangan Pemerintah Daerah KKU berkualitas sehingga terwujud predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," harap Idrus.

Wabup juga menyampaikan ringkasan laporan keuangan pemerintah daerah KKU tahun anggaran 2014 yang telah diaudit BPK RI perwakilan

Provinsi Kalimantan Barat yang nantinya menjadi subsatansi rancangan peraturan daerah KKU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014.

Realisasi pendapatan tahun 2014 sebesar Rp 522,98 miliar atau 98,76 persen dari anggaran pendapatan tahun 2014 sebesar Rp 529,55 miliar. Belanja terealisasi sebesar Rp 507,63 miliar atau 92,25 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 550,29 miliar. Pembiayaan netto terealisasi sebesar Rp 20,74 miliar.

Ketua DPRD Kayong Utara, M Sukardi mengungkapkan, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD, merupakan satu dari sekian akuntabilitas politik bupati yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.

"Hal ini sesuai pasal 320 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015," kata Sukardi. (fau)